

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Kunker Meroket

Pengamat: Baiknya Uang Itu untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA - Di 2020, anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI naik sekitar Rp93,4 miliar. Anggaran tersebut naik sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2019, anggaran kunker para politisi di Kebon Sirih itu sekitar Rp60,8 miliar.

Namun, kenaikan anggaran tersebut diketahui seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warseno. Ia mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran kunker tersebut.

"Saya belum tau kalau yang itu (anggaran kunker naik-red). Tanya ke Sekwan (Sekretaris Dewan-red), Sekwan yang tau. Saya takut salah jawab," ujar Gembong kepada INDOPOS, Selasa (14/1/20).

Kendati demikian, Gembong menganggap kenaikan anggaran itu wajar. Setiap tahun anggaran dipastikan naik. Namun, ia tidak mengetahui penyebab anggaran kunker DPRD DKI naik drastis. "Saya kira biasa saja (naik-red), sama seperti kaya tahun lalu. Kenaikannya gimana kan saya belum tau. Kayanya sih biasa aja," kata dia.

Selain itu, Gembong mengatakan, kenaikan anggaran tidak diikuti dengan fasilitas yang diberikan kepada anggota dewan. "Karena fasilitas tidak ada yang berubah. Fasilitas masih sama. Cuma kenapa itu berubah (anggaran naik) kan kita engga tau kenapa. Artinya fasilitas yang kami terima sama, kalau alokasi anggaran naik kenapa? Sekwan yang tau," ucap dia.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Basco mengatakan, kenaikan anggaran kunker bisa disebabkan jadwal kunker yang begitu padat. Selain itu, terkait kunker bagi para anggota dewan tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No 18.

"Di PP 18 itu memang fasilitas itu ada. Dan kalau kita tidak maksimalkan jadi dewannya salah, contoh tenaga ahli, logikannya kan DPRD itu kan ada tenaga ahli, yang melekat. Karena di PP 18 nya tidak ada kita engga dapet. Tidak bisa kita paksain ada," beber Basri.

Kunker itu, sambung Basri, di PP No 18 ada 4 macam. Setiap minggu anggota dewan mendapat jatah kunker. Untuk jadwal kunker, terbit setiap satu bulan sekali berdasarkan Bamus. Setiap hari Kamis dan Sabtu akan diberitahukan kunker yang akan dilaksanakan. "Sebulan itu, maksimal 3 kali atau 4 kali, kalau ada pansus,"

kata dia.

Sementara itu, terkait kenaikan drastis anggaran kunker anggota DPRD DKI, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, kenaikan tersebut sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Emrus juga menyebutkan, kenaikan yang begitu drastis seharusnya tidak terjadi. "Kalau bisa anggaran itu ditekan kembali. Alangkah baiknya uang tersebut untuk kepentingan rakyat. Sekarang kan kita lihat warga Jakarta baru saja terkena musibah banjir," tandas dia.

Selain itu, Emrus juga menyarankan agar anggaran tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat DKI. "Kegiatan anggota dewan dengan anggaran yang begitu sepatutnya digunakan untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Selain itu, INDOPOS juga mencoba mengkonfirmasi terkait kenaikan anggaran kunker anggota DPRD DKI kepada Sekertaris Dewan (Sekwan) M Yuliadi. Namun yang bersangkutan belum memberi jawaban. (bar)

ANGGARAN KUNKER DPRD DKI JAKARTA

- Uang Perjalanan Dinas per hari Rp4 juta untuk 6.450 orang, total Rp25,8 miliar
- Biaya Pesawat Kunker ke daerah, total Rp27 miliar untuk 664 orang
- Biaya Penginapan atau Hotel sebesar Rp11,8 miliar untuk 11.331 orang

Jenis Kunker

- Kunker Fraksi
- Kunker Komisi
- Kunker Badan
- Kunker pansus

ANGGA GUMELAR/INDOPOS